

Rancangan Akhir RENSTRA
Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kabupaten Toba
Tahun 2025-2029

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan penyusunan rancangan akhir Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029. Rancangan akhir Rencana Strategis ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba dalam melaksanakan urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan serta penelitian dan Pengembangan.

Rancangan akhir Rencana Strategis disusun dengan mempertimbangkan berbagai keadaan, menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD; Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; serta Peraturan Bupati Toba Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Kami menyadari bahwa rancangan akhir Rencana Strategis yang kami susun ini masih banyak kekurangan dan kelemahannya. Oleh karena itu, kami mengharapkan saran dan masukan agar tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan rencana kegiatan dalam Rencana Strategis ini terlaksana dengan sebaik-baiknya.

Balige, Agustus 2025

KEPALA BADAN PERENCANAAN,
PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH
KABUPATEN TOBA

SOFIAN H.H SITORUS, ST
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19730317 200604 1 002\

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GRAFIK.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan.....	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-4
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BAPPELITBANGDA KABUPATEN TOBA	
2.1 Gambaran Pelayanan.....	II-1
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur.....	II-1
2.1.2 Sumber Daya.....	II-4
2.1.3 Kinerja pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Toba.....	II-12
2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan.....	II-16
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis.....	II-16
2.2.1 Permasalahan.....	II-16
2.2.2 Isu Strategis.....	II-18
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1 Tujuan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Dearah Kabupaten Toba.....	III-1
3.2 Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba.....	III-2
3.3 Strategi Arah Kebijakan Perangkat daerah.....	III-4
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA BAPPELITBANGDA KABUPATEN TOBA	

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba.....	IV-1
4.2 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas pembangunan daerah.....	IV-9
4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)	IV-11
4.4 Indikator Kinerja Daerah (IKD)	IV-11
4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK)	IV-11

BAB V PENUTUP

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Aset Bappelitbangda Kabupaten Toba Tahun 2025.....	II-8
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappelitbangda.....	II-13
Tabel 2.3 Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bappelitbangda Kabupaten Toba.....	II-17
Tabel 2.4 Isu Strategis Berdasarkan Identifikasi Akar Masalah...	II-24
Tabel 3.1 Tujuan Ranhir Renstra Bappelitbangda Tahun 2025- 2029.....	III-2
Tabel 3.2 Sasaran Ranhir Renstra Bappelitbangda Tahun 2025- 2029.....	III-3
Tabel 3.3 Strategi dan Arah Kebijakan Ranhir Renstra Bappelitbangda Tahun 2025-2029.....	III-6
Tabel 4.1 Rencana Program Bappelitbangda 2025-2029.....	IV-2
Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Bappelitbangda 2025-2029.....	IV-3
Tabel 4.3 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	IV-9
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Ranhir Bappelitbangda	IV-11
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Daerah Ranhir Bappelitbangda.....	IV-11
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Ranhir Bappelitbangda.....	IV-12

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Toba Berdasarkan Jenis Kelamin.....	II-5
Grafik 2.2 ASN Bappelitbangda Kabupaten Toba berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	II-6
Grafik 2.3 ASN Bappelitbangda Kabupaten Toba berdasarkan Pangkat, Golongan dan Ruang.....	II-7

DAFTAR GRAFIK

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bappelitbangda Kabupaten Toba.....	II-4
--	------

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah antara lain mengamanatkan kepada Organisasi Pemerintah Daerah Untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka waktu lima tahun berupa Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan bahwa “Perangkat daerah menyusun Renstra Berdasarkan atas RPJMD”. Renstra tersebut memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintah wajib dan/atau urusan pemerintah pilihan sesuai dengan tugas fungsi setiap perangkat daerah.

Renstra perangkat daerah memiliki peran yang strategis dalam pembangunan karena merupakan penerjemahan secara operasional dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), hal ini dikarenakan di dalam dokumen Renstra perangkat daerah telah digambarkan rencana-rencana kegiatan indikatif yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

Renstra perangkat daerah berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai. Renstra perangkat daerah merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra perangkat daerah yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan visi dan

misi, program, kegiatan, sub kegiatan termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.

Renstra perangkat daerah disusun dengan tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal Renstra perangkat daerah, penyusunan rancangan Renstra perangkat daerah, pelaksanaan forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah, perumusan rancangan akhir Renstra perangkat daerah, dan penetapan Renstra perangkat daerah.

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Toba adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan dokumen perencanaan teknis operasional yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba Tahun 2025-2029.

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih yang dituangkan kedalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 dengan Visi “TOBA MANTAP 2029: Maju Daerahnya, Sejahtera Rakyatnya dan Berkelanjutan Pembangunannya”, yang akan dicapai dengan 6 Misi pembangunan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan rancangan akhir Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba tahun 2025-2029 diuraikan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Toba Samosir;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Toba Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun 2024 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Toba Nomor ____ Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Toba Tahun ____ Nomor ____);
14. Peraturan Bupati Toba Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Toba Tahun 2022 Nomor 4).

1.3 Maksud dan Tujuan

Rancangan akhir Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba tahun 2025-2029 disusun sebagai gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis, strategi, arah kebijakan, tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam bentuk

program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi yang terkait urusan perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan yang wajib dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba selama kurun waktu tahun 2025-2029.

Tujuan dari penyusunan rancangan akhir Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba yaitu:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program kegiatan dan sub kegiatan perencanaan pembangunan daerah selama kurun waktu tahun 2025-2029 dalam menjalankan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba;
2. Sebagai tolok ukur kinerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba;
3. Pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah tahunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan rancangan akhir Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

- 2.1. Gambaran Pelayanan yang memuat:
 - A. Tugas, fungsi dan struktur
 - B. Sumber daya
 - C. Kinerja pelayanan
 - D. Kelompok sasaran layanan
- 2.2. Permasalahan dan Isu Strategis yang memuat:
 - A. Permasalahan
 - B. Isu strategis

BAB III Tujuan, Sasaran strategi dan Arah Kebijakan

- 3.1. Tujuan perangkat daerah
- 3.2. Sasaran perangkat daerah
- 3.3. Strategi arah kebijakan perangkat daerah

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Bappelitbangda Kabupaten Toba

- 4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba
- 4.2. Sub kegiatan prioritas dalam mendukung program prioritas pembangunan daerah
- 4.3. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 4.4. Indikator Kinerja Daerah (IKD)
- 4.5. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB V Penutup

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BAPPELITBANGDA KABUPATEN TOBA

2.1 Gambaran Pelayanan

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur

A. Tugas

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba dalam penyelenggaraan pemerintah daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, pengendalian serta evaluasi program pembangunan serta penelitian dan pengembangan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Toba Nomor 4 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah bahwa Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba mempunyai tugas “membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan lingkup perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah”.

B. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dibidang perencanaan, pengendalian serta evaluasi program pembangunan serta penelitian dan pengembangan, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
2. pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;

3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pembangunan daerah;
4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan lingkup perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah berdasarkan atas peraturan perundang-undangan; dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

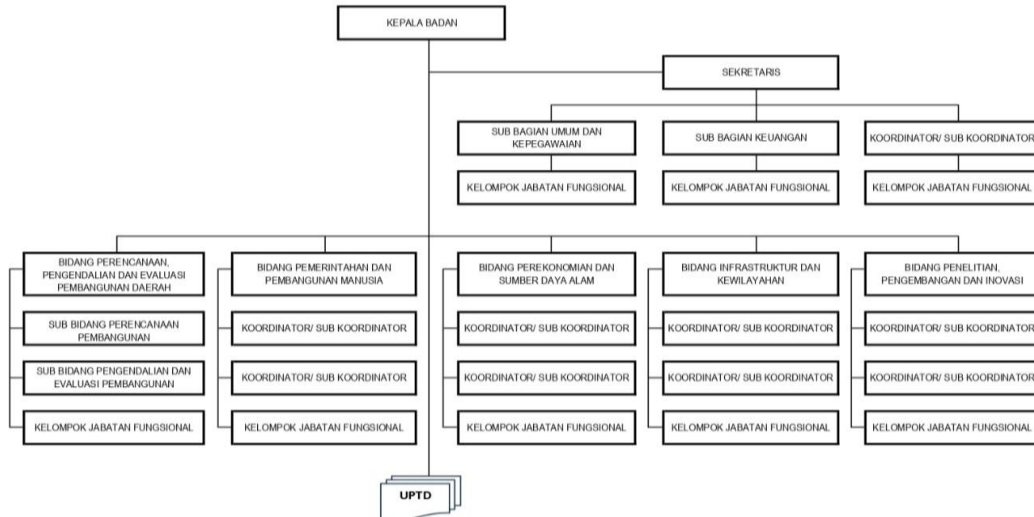
C. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba terdiri atas:

- a) Kepala Badan/Jabatan pimpinan tinggi pratama setara eselon II.b.
- b) Sekretaris/jabatan administrator setara eselon III.a, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 2. Sub Bagian Keuangan/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 3. Koordinator/Sub Koordinator lingkup Program;
 4. Jabatan Fungsional; dan
 5. Jabatan Pelaksana.
- c) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah/ jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
 1. Sub Bidang Perencanaan Pembangunan/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 2. Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan/jabatan pengawas setara eselon IV.a;
 3. Jabatan Fungsional; dan
 4. Jabatan Pelaksana.

- d) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
 - 1. Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pemerintahan;
 - 2. Koordinator/Sub Koordinator lingkup Pembangunan Manusia;
 - 3. Jabatan Fungsional; dan
 - 4. Jabatan Pelaksana.
- e) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
 - 1. Koordinator/Sub Koordinator lingkup Perekonomian;
 - 2. Koordinator/Sub Koordinator lingkup Sumber Daya Alam;
 - 3. Jabatan Fungsional; dan
 - 4. Jabatan Pelaksana.
- f) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
 - 1. Koordinator/Sub Koordinator lingkup Infrastruktur;
 - 2. Koordinator/Sub Koordinator lingkup Kewilayahan;
 - 3. Jabatan Fungsional; dan
 - 4. Jabatan Pelaksana.
- g) Bidang Penelitian, Pengembangan dan Inovasi/jabatan administrator setara eselon III.b, terdiri dari:
 - 1. Koordinator/Sub Koordinator lingkup Penelitian dan Pengembangan;
 - 2. Koordinator/Sub Koordinator lingkup Inovasi;
 - 3. Jabatan Fungsional; dan
 - 4. Jabatan Pelaksana.
- h) UPT;
- i) Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.

Adapun bagan Struktur Organisasi (Sesuai Peraturan Bupati Toba Nomor 4 Tahun 2024) dapat dilihat dibawah ini:



Gambar 2.1
Struktur Organisasi Bappelitbangda Kabupaten Toba

2.1.2 Sumber Daya

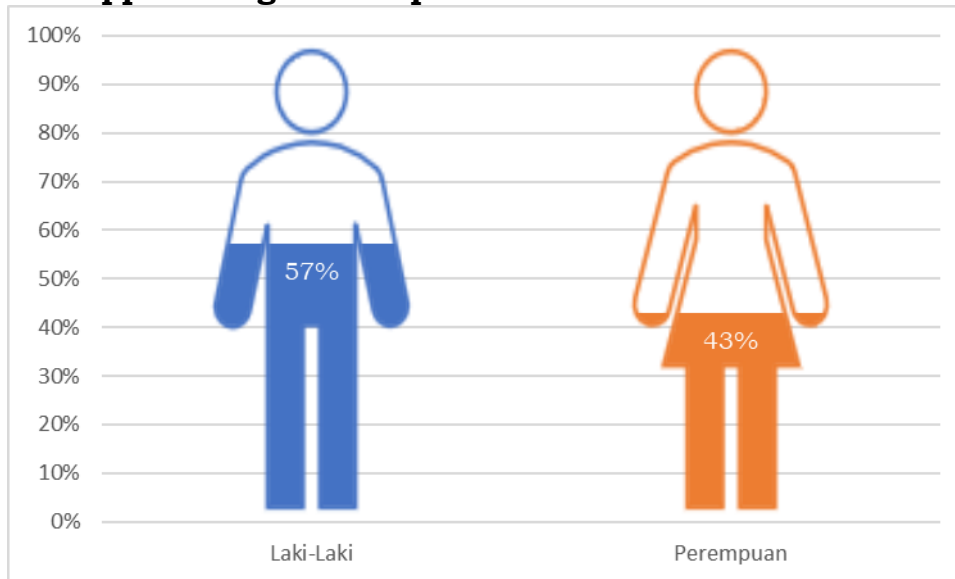
A. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam menjalankan roda organisasi. Kemajuan perkembangan zaman diikuti dengan meningkatnya tuntutan masyarakat atas pelayanan dari pemerintah, sehingga dibutuhkan aparatur atau sumber daya manusia yang berkualitas.

Perencanaan pembangunan daerah menjadi awal penentu keberhasilan dalam pencapaian tujuan daerah. Dengan berbagai perubahan dalam tatanan organisasi, aparatur perencana dituntut responsif atas kondisi dan permasalahan yang terjadi di daerah untuk dijadikan bahan perencanaan yang berkualitas.

Berdasarkan data kepegawaian per Juli 2025, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba memiliki 33 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 2 orang tenaga kontrak. ASN terdiri atas 19 laki-laki dan 1 perempuan, sedangkan tenaga kontrak terdiri atas 1 laki-laki dan 1 perempuan. Adapun rincian jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba adalah sebagai berikut.

Grafik 2.1.
Pegawai Bappelitbangda Kabupaten Toba Berdasarkan Jenis Kelamin

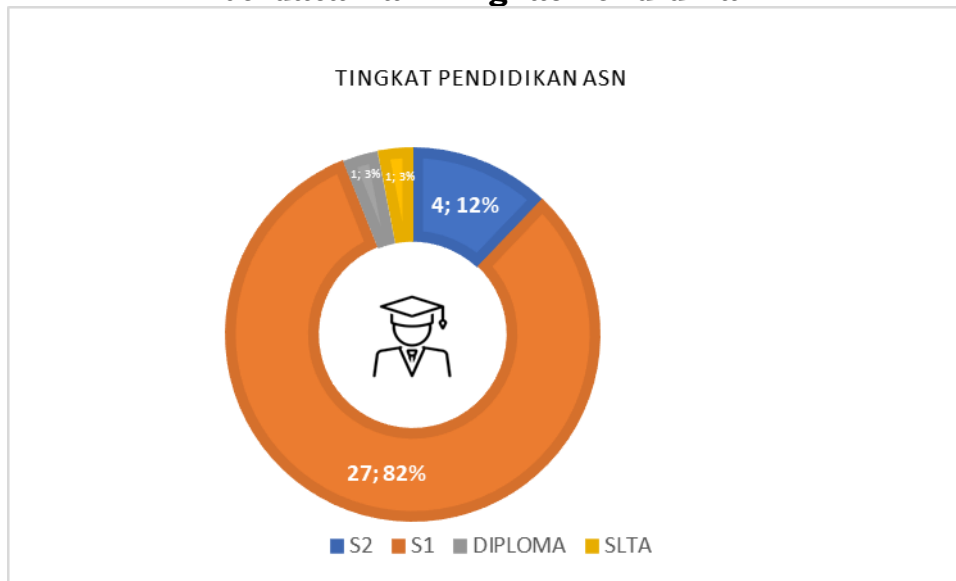


Sumber: Data Olahan Kepegawaian Bappelitbangda Juli 2025

Sesuai dengan hasil Analisa Jabatan, untuk menjalankan tugas dan fungsi Bappelitbangda yang ideal didukung oleh 72 orang pegawai dengan rincian Jabatan Tinggi, Jabatan Fungsional, Jabatan Administrator dan Pengawas, Jabatan Sub Koordinator dan Jabatan Pelaksana. Dengan demikian sampai dengan bulan Juli tahun 2025 Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba secara keseluruhan masih ada kekurangan SDM sebanyak 39 Orang.

Meskipun dari segi kuantitas belum memadai, tingkat pendidikan ASN pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba dapat dikatakan cukup tinggi. Sebanyak 12% ASN telah menempuh pendidikan S2, 82% berpendidikan S1, 3% merupakan lulusan Diploma, dan 3% merupakan tamatan SLTA. Hal ini menjadi salah satu kekuatan dalam membentuk ASN yang berkualitas. Rincian jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada grafik berikut

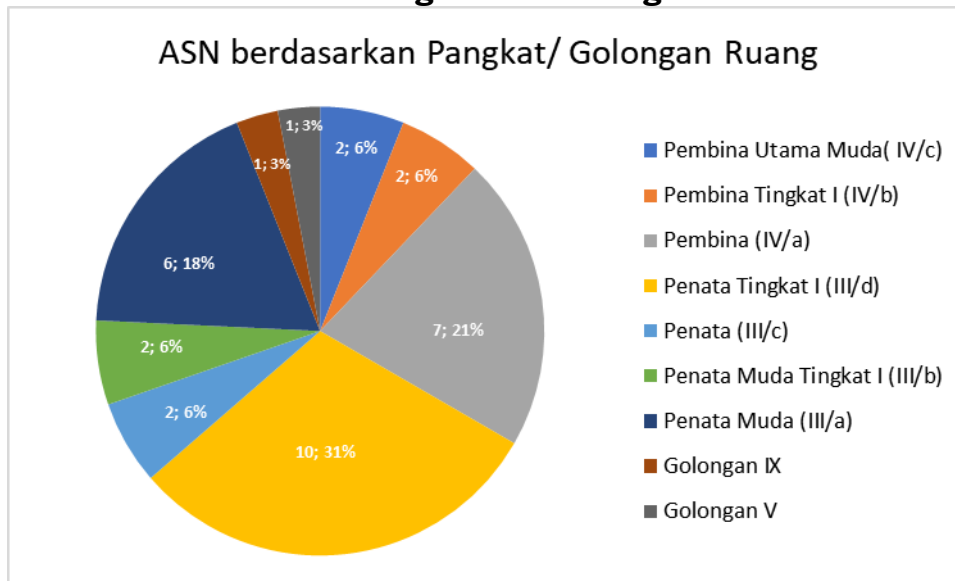
Grafik 2.2
ASN Bappelitbangda Kabupaten Toba
berdasarkan Tingkat Pendidikan



Sumber: Data Olahan Kepegawaian Bappelitbangda Juli 2025

Selain tingkat pendidikan, seperti yang dapat dilihat pada tabel di bawah, pangkat dan golongan ruang ASN Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba dapat dikatakan tinggi, yakni yang terbanyak adalah sebesar 31% sudah memiliki pangkat Penata Tingkat I (III/d). Dapat dikatakan bahwa sebagian besar ASN Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba telah memiliki pengalaman yang cukup dalam pengelolaan organisasi pemerintahan. Akan tetapi hal tersebut perlu mendapat perhatian dikarenakan pegawai dengan pangkat tersebut sudah cukup waktu untuk diangkat ke dalam jenjang struktural yang lebih tinggi, sehingga harus dipersiapkan kaderisasi yang tepat karena urusan perencanaan perlu dipegang oleh ASN yang memiliki pengalaman cukup dan kompeten dalam bidang perencanaan penelitian dan pengembangan.

Grafik 2.3
ASN Bappelitbangda Kabupaten Toba berdasarkan Pangkat, Golongan dan Ruang



Sumber: Data Olahan Kepegawaian Bappelitbangda Juli 2025

B. Sarana dan Prasarana

Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba terletak pada lokasi yang strategis yaitu mudah dijangkau dan memiliki aksesibilitas yang baik. Secara umum kondisi prasarana gedung belum memadai dengan kondisi gedung yang kurang baik karena material bangunan dapat mengalami penurunan kualitas dan kekuatan. Kondisi ruangan kerja ASN dapat dikatakan belum nyaman karena ruangan yang sempit, pencahayaan yang kurang, sirkulasi udara yang kurang baik, dan tata letak peralatan kantor yang belum ergonomis.

Selain ruangan kerja ASN, fasilitas lain yang dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba sebagai fasilitas penunjang utama adalah 2 (dua) ruangan rapat dengan daya tampung peserta yang berbeda-beda sehingga dapat menyesuaikan dengan skala rapat atau pertemuan yang diselenggarakan.

Secara lebih jelasnya kondisi sarana dan prasarana pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Aset Bappelitbangda Kabupaten Toba Tahun 2025

No.	Nama Aset	Satuan	Jumlah	Tahun Pengadaan	Kondisi
1	Lemari Kayu	Unit	1	1999	Kurang Baik
2	Meja 1/2 Biro	Unit	1	1999	Baik
3	Rak Kayu	Unit	2	1999	Kurang Baik
4	Meja Sekolah	Unit	16	1999	Kurang Baik
5	Meja 1/2 Biro	Unit	4	1999	Kurang Baik
6	Lemari Kayu	Unit	1	2002	Baik
7	Lemari Kayu	Unit	2	2003	Kurang Baik
8	Lemari Kayu	Unit	2	2007	Baik
9	Meja 1/2 Biro	Unit	1	2008	Baik
10	Meja 1/2 Biro	Unit	5	2008	Kurang Baik
11	Kursi Lipat	Unit	3	2008	Baik
12	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	1	2011	Baik
13	Meja Rapat	Unit	11	2012	Baik
14	Televisi	Unit	1	2012	Baik
15	Meja Rapat Pejabat lainnya	Unit	3	2012	Baik
16	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	Unit	2	2012	Baik
17	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Unit	4	2012	Baik
18	P.C Unit	Unit	1	2012	Baik
19	Kursi Rapat	Unit	48	2012	Baik
20	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	1	2013	Baik
21	Sepeda Motor	Unit	3	2013	Baik
22	Sepeda Motor	Unit	2	2013	Baik
23	Meja Komputer	Unit	1	2013	Baik
24	Meja Komputer	Unit	5	2013	Baik
25	A.C. Window	Unit	2	2013	Baik
26	Gordyin/Kray	Pcs	17	2013	Baik

No.	Nama Aset	Satuan	Jumlah	Tahun Pengadaan	Kondisi
27	Lap Top	Unit	1	2013	Baik
28	Sepeda Motor	Unit	1	2014	Baik
29	Sepeda Motor	Unit	1	2014	Baik
30	Filing Cabinet Besi	Unit	2	2014	Baik
31	White Board	Unit	1	2014	Baik
32	Papan Pengumuman	Unit	1	2014	Baik
33	A.C. Window	Unit	2	2014	Baik
34	Meja Tamu Ruangan Tunggu Pejabat Eselon II	Unit	1	2014	Baik
35	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	Unit	3	2014	Baik
36	Camera Electronic	Unit	1	2014	Baik
37	Tripod Camera	Unit	1	2014	Baik
38	Lensa Kamera	Unit	1	2014	Baik
39	Alat Studio Video Lainnya	Unit	4	2014	Baik
40	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	Unit	1	2014	Baik
41	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Unit	1	2014	Baik
42	kendaraan bermotor angkutan barang lainnya (dst)	Unit	1	2015	Baik
43	Sepeda Motor	Unit	5	2015	Baik
44	Televisi	Unit	1	2015	Baik
45	Lap Top	Unit	1	2015	Baik
46	Note Book	Unit	1	2015	Baik
47	Hard Disk	Unit	1	2015	Baik
48	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Unit	1	2015	Baik
49	Wireless Data Transmission System	Unit	1	2015	Baik
50	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Unit	1	2016	Baik
51	Washing Instrument (Alat Laboratorium Kimia)	Unit	1	2016	Baik
52	Lap Top	Unit	1	2016	Baik

No.	Nama Aset	Satuan	Jumlah	Tahun Pengadaan	Kondisi
53	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Unit	1	2016	Baik
54	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Unit	1	2016	Baik
55	Global Positioning System	Unit	1	2017	Baik
56	Filing Cabinet Besi	Unit	5	2017	Baik
57	Televisi	Unit	1	2017	Baik
58	Camera Video	Unit	1	2017	Baik
59	Camera Video	Unit	1	2017	Baik
60	Genset	Unit	1	2017	Baik
61	P.C Unit	Unit	1	2017	Baik
62	Note Book	Unit	3	2017	Baik
63	Note Book	Unit	1	2017	Baik
64	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Unit	3	2017	Baik
65	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Unit	1	2017	Baik
66	Focusing Screen/ Layar LCD Projector	Unit	1	2018	Baik
67	Meja Rapat	Unit	1	2018	Baik
68	Sofa	Unit	1	2018	Baik
69	Meja Kerja Pejabat Eselon II	Unit	1	2018	Baik
70	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Unit	1	2018	Baik
71	peralatan studio audio lainnya (dst)	Unit	1	2018	Baik
72	Tripod Camera	Unit	1	2018	Baik
73	Camera Film	Unit	1	2018	Baik
74	Layar Film/Projector	Unit	1	2018	Baik
75	Bateray Pack Camera	Unit	1	2018	Baik
76	P.C Unit	Unit	1	2018	Baik
77	Lap Top	Unit	2	2018	Baik
78	Lap Top	Unit	1	2018	Baik
79	Hard Disk	Unit	2	2018	Baik
80	Printer (Peralatan	Unit	1	2018	Baik

No.	Nama Aset	Satuan	Jumlah	Tahun Pengadaan	Kondisi
	Personal Komputer)				
81	Kursi Rapat	Unit	52	2018	Baik
82	Pompa Air	Unit	1	2017	Baik
83	Lemari Es	Unit	1	2019	Baik
84	A.C. Window	Unit	1	2019	Baik
85	A.C. Split	Unit	1	2019	Baik
86	Audio Amplifier	Unit	1	2019	Baik
87	P.C Unit	Unit	2	2019	Baik
88	P.C Unit	Unit		2019	Baik
89	Lap Top	Unit	2	2019	Baik
90	Note Book	Unit	2	2019	Baik
91	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Unit	1	2019	Baik
92	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Unit	4	2019	Baik
93	Penyemprot Mesin (Power Sprayer)	Unit	1	2021	Baik
94	Mesin Pemotong Rumput	Unit	1	2021	Baik
95	Lap Top	Unit	1	2021	Baik
96	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Unit	1	2021	Baik
97	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Unit	1	2021	Baik
98	External/ Portable Hardisk	Unit	1	2021	Baik
99	Alat Rumah Tangga Lain-lain	Unit	12	2021	Baik
100	Meja 1/2 Biro	Unit	2	2022	Baik
101	Meja Kerja Pejabat lain lain	Unit	1	2022	Baik
102	Alat Studio Lainnya	Unit	1	2022	Baik
103	Lap Top	Unit	1	2022	Baik
104	Lap Top	Unit	1	2022	Baik
105	Note Book	Unit	1	2022	Baik
106	Kursi Basa	Unit	2	2022	Baik
107	Kursi Basa	Unit	3	2022	Baik

Sumber: Data Olahan Pengurus Barang Bappelitbangda

2.1.3 Kinerja Pelayanan Bappelitbangda Kabupaten Toba

Capaian kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba dapat dilihat dari capaian indikator kinerja, yaitu dengan membandingkan realisasi target indikator dengan target yang telah ditetapkan.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappelitbangda

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1.	Nilai Perencanaan Kinerja					19,08		21,26	23,45	25,63	19,26	19,50	20,00	21,03		91,72	85,29	82,05
2.	Persentase hasil kelitbangan dalam dokumen perencanaan					NA		100%	100%	100%		100%	90%	90%		100	90	90
3.	Tingkat kesesuaian target program Renstra OPD terhadap target Program RPJMD					100%		100%	100%	100%		100%	100%	100%		100	100	100
4.	Tingkat kesesuaian target kegiatan Renja OPD terhadap target prioritas pembangunan RKPD					100%		100%	100%	100%		100%	100%	100%		100	100	100
5.	Jumlah kebijakan hasil penelitian dan pengembangan					NA		7	7	13		7	6	8		100	85,71	61,54
6.	Persentase dokumen atau laporan					100%		100%	100%	100%		100%	100%	83,33%		100	100	83,33
7.	Persentase koordinasi perencanaan pembangunan daerah					100%		100%	100%	100%		100%	100%	100%		100	100	100
8.	Persentase implementasi rencana kelitbangan					NA		100%	100%	100%		100%	37,50%	37,50%		100	37,50	37,50
9.	Penunjang kinerja perangkat daerah					100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	68,33%	89,64%	100	100	68,33	89,64

A. Capaian Tujuan Renstra Bappelitbangda

Pada Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 telah dirumuskan bahwa tujuan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah terwujudnya perencanaan yang berkualitas dan terwujudnya penelitian pengembangan yang inovatif dan berkualitas untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah yang diukur dengan pencapaian indikator kinerja. Pencapaian indikator tersebut dapat dijelaskan bahwa:

- a. Indikator nilai perencanaan kinerja dari tahun 2021-2024 tidak tercapai. Tahun 2022 target 21,26 dan realisasi 19,50, tahun 2023 target 23,45 dan realisasi 20,00, tahun 2024 target 25,63 dan realisasi 21,03, tidak tercapai karena konsistensi antara tujuan, sasaran, indikator, dan program/kegiatan belum optimal sehingga masih kurang keterkaitan antara dokumen perencanaan RPJMD, Renstra, dan RKPD.
- b. Indikator persentase hasil kelitbangan dalam dokumen perencanaan tahun 2022 target 100% dan realisasi 100%, perencanaan tahun 2023 target 100% dan realisasi 100%, tahun 2024 target 100% dan realisasi 90%, target tahun 2024 tidak tercapai karena keterbatasan anggaran.

B. Capaian Sasaran Renstra Bappelitbangda

Pada Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 telah dirumuskan bahwa sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ada 3 yaitu meningkatnya kesesuaian target program Renstra OPD terhadap target Program RPJMD, meningkatnya kesesuaian target kegiatan Renja OPD terhadap target prioritas pembangunan RKPD, dan implementasi hasil kelitbangan dalam dokumen perencanaan yang diukur dengan pencapaian indikator kinerja. Pencapaian indikator tersebut dapat dijelaskan bahwa:

- a. Indikator tingkat kesesuaian target program Renstra OPD terhadap target Program RPJMD. Target indikator dari tahun 2021-2024 tercapai 100%.
 - b. Indikator tingkat kesesuaian target kegiatan Renja OPD terhadap target prioritas pembangunan RKPD. Target indikator dari tahun 2021-2024 tercapai 100%.
 - c. Indikator jumlah kebijakan hasil penelitian dan pengembangan. Tahun 2022 target indikator 7 dokumen dan realisasi 7 dokumen. Tahun 2023 target 7 dokumen dan realisasi sebesar 6 dokumen, tahun 2024 target 13 dokumen dan realisasi 8 dokumen, target tahun 2023-2024 tidak tercapai karena keterbatasan anggaran.
- C. Capaian Program Renstra Bappelitbangda
- Pada Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba Tahun 2021-2026 telah dirumuskan bahwa program Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah ada 4 yaitu program perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, program penelitian dan pengembangan daerah, dan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota yang diukur dengan pencapaian indikator kinerja. Pencapaian indikator tersebut dapat dijelaskan bahwa:
- a. Indikator persentase dokumen atau laporan. Target indikator dari tahun 2022-2023 tercapai 100%. Tahun 2024 target indikator 100% dan realisasi 83,33% tidak tercapai karena keterbatasan anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM).
 - b. Indikator persentase koordinasi perencanaan pembangunan daerah. Target indikator dari tahun 2022-2024 tercapai 100%
 - c. Indikator persentase implementasi rencana kelitbang. Target indikator dari tahun 2022 tercapai 100%. Target indikator dari tahun 2023-2024 100% dan realisasi 37,50% tidak tercapai karena keterbatasan anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM).

- d. Indikator penunjang kinerja perangkat daerah. Target indikator dari tahun 2021-2022 tercapai 100%. Tahun 2023 target indikator 100% dan realisasi 68,33%, tahun 2024 target indikator 100% dan realisasi 89,64% tidak tercapai karena keterbatasan anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM)

2.1.4 Kelompok sasaran layanan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba memberikan layanan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Kelompok sasaran layanan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba adalah semua perangkat daerah, DPRD, instansi vertikal dan akademisi.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1. Permasalahan

Permasalahan merupakan pernyataan tentang kondisi yang belum sesuai dengan apa yang diharapkan. Permasalahan merupakan kesenjangan antara capaian kinerja dengan target kinerja.

Peningkatan kualitas perencanaan tidak terlepas dari kapasitas kelembagaan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba yang meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana, serta sistem perencanaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan evaluasi capaian kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba pada periode sebelumnya maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba antara lain:

1. Belum optimalnya koordinasi antara institusi perencana dengan OPD terkait;
2. Belum sinkronnya antara RPJMD dengan Renstra OPD;
3. Pemanfaatan hasil riset dan penggunaan data dalam perencanaan pembangunan belum optimal;
4. Jumlah sumber daya manusia (SDM) aparatur belum memadai/ belum sesuai dengan perhitungan kebutuhan ideal organisasi;
5. Belum optimalnya pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data berbasis Teknologi Informasi yang tersusun secara sistematis dan akurat;
6. Sistem aplikasi perencanaan yang belum terintegrasi dengan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi.

Tabel 2.3
Masalah Pokok, Masalah dan Akar Masalah Bappelitbangda Kabupaten Toba

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi dalam proses perencanaan daerah	Belum optimalnya koordinasi antara institusi perencana dengan OPD terkait	Kurangnya Koordinasi antara institusi perencana dan OPD
		Belum sinkronnya antara RPJMD dengan Renstra OPD	Adanya perbedaan pemahaman antara institusi perencana dengan OPD
2	Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	Pemanfaatan hasil riset dan penggunaan data dalam perencanaan pembangunan belum optimal	Hasil riset belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan
			Jumlah ASN di bidang penelitian dan pengembangan yang belum memadai, dan kompetensi ASN mengenai penelitian dan pengembangan masih kurang

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
3	Belum optimalnya pemanfaatan sistem teknologi informasi dalam melakukan pemantauan kinerja organisasi, hal tersebut berdasarkan hasil penilaian perencanaan kinerja dalam Evaluasi AKIP Kabupaten sebesar 21,03.	Jumlah sumber daya manusia (SDM) aparatur belum memadai / belum sesuai dengan perhitungan kebutuhan ideal organisasi	Jumlah ASN belum memadai, Kompetensi ASN yang belum merata pada tiap bidang
		Belum optimalnya pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data berbasis Teknologi Informasi yang tersusun secara sistematis dan akurat	Pengelolaan data yang masih dilakukan oleh masing masing bidang
		Sistem aplikasi perencanaan yang belum terintegrasi dengan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi	Sistem aplikasi pengendalian, monitoring dan evaluasi yang belum dapat dipergunakan

2.2.2. Isu Strategis

isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan dan dikedepankan karena Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba diharapkan dapat menghasilkan perencanaan yang berkualitas, selaras, konsisten dan akuntabel.

Isu-isu strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba mempertimbangkan pada isu global, isu nasional, dan isu-isu pembangunan di Kabupaten Toba.

A. Isu Strategis Global

Ekonomi Global

Kondisi ekonomi global saat ini menghadapi ketidakpastian yang meningkat. Ada beberapa faktor yang memicunya, salah satu yang paling signifikan adalah konflik geopolitik antar beberapa negara seperti Rusia dan Ukraina, Timur Tengah, dan yang baru-baru ini mengemuka adalah perang dua negara antara India dan Pakistan yang semakin memanas. Tekanan geopolitik dan kebijakan tarif Presiden Trump menyebabkan disrupsi rantai pasok global, risiko kembalinya tekanan inflasi tinggi di negara maju serta perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan Laporan World Economic Situation and Prospects 2024 dari PBB, prospek ekonomi global masih menghadapi tantangan yang signifikan. Pertumbuhan ekonomi dunia diproyeksikan melambat dari 2,7 persen pada 2023 menjadi 2,4 persen pada 2024, yang berada di bawah tingkat pertumbuhan pra-pandemi sebesar 3,0 persen. Faktor utama yang memperlambat pertumbuhan ini mencakup suku bunga yang masih tinggi, meningkatnya ketegangan geopolitik, perdagangan internasional yang lesu, serta bencana iklim yang semakin sering terjadi.

Isu ekonomi global yang menurut PBB perlu menjadi perhatian di akhir 2024, yaitu:

1. Perlambatan Pertumbuhan Ekonomi Global;
2. Ketidakstabilan Geopolitik dan Dampaknya pada Ekonomi;
3. Perubahan Iklim dan Dampaknya pada Ekonomi;
4. Kesenjangan Ekonomi dan Sosial;
5. Peran Teknologi dan Kecerdasan Buatan dalam Ekonomi

B. Isu Strategis Nasional

Kapasitas Ilmu Pengetahuan, teknologi dan Inovasi (IPTEKIN)

Peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi secara nasional masih dihadapkan pada lemahnya komitmen pemerintah, terutama dari segi anggaran yang hanya mencapai 0,28 % dari PDB. Padahal kedepannya kapasitas IPTEKIN menjadi sangat penting untuk meningkatkan daya saing bangsa melalui peningkatan efisiensi dan penciptaan produk-produk berkualitas dan berteknologi tinggi. Penguatan fondasi infrastruktur dasar riset dan inovasi masih menghadapi tantangan pada pemerataan distribusi kuantitas dan kualitas peneliti/periset, serta masih belum optimalnya kuantitas dan kualitas inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah, terutama inovasi berbasis sains dan teknologi yang bersifat applied dan evidence based.

Perluasan kemitraan ekosistem riset dan inovasi juga masih belum optimal, terutama pada kolaborasi stakeholders dalam meningkatkan difusi dan inkubasi teknologi inovasi yang dapat direplikasi dan berkelanjutan, khususnya dalam pengembangan klaster dan teknologi inovasi berbasis produk unggulan daerah.

C. Isu Strategis Provinsi

Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan yang Dinamis, Akuntabel, Transparan dan Kolaboratif

Provinsi Sumatera Utara masih menghadapi dua persoalan utama yaitu memperbaiki tata kelola pemerintahan yang fokus pada kapabilitas dan integritas dan memperbaiki kualitas pelayanan publik yang belum optimal kepada masyarakat. Kapabilitas tata pemerintahan berfokus pada penguatan transisi reformasi birokrasi menuju reformasi Birokrasi tematik, memperbaiki proses bisnis adaptif dengan

dukungan teknologi informasi, meningkatkan profesionalisme ASN melalui meritokrasi dan penguatan core value.

Isu-isu berkaitan dengan tata kelola pemerintahan lainnya ialah pemanfaatan kehadiran teknologi informasi dalam area deregulasi kebijakan, penataan kelembagaan, penguatan profesionalisme ASN, penguatan kualitas pengawasan, penguatan akuntabilitas dan pelayanan publik. Ketersediaan dan keterjangkauan teknologi pada masyarakat sipil diharapkan mampu mentransformasi posisi masyarakat dari objek menjadi subjek pembangunan.

D. Isu Strategis Kabupaten

Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs)

Kabupaten Toba memiliki posisi strategis sebagai daerah yang kaya akan sumber daya alam, budaya, serta potensi ekonomi, khususnya di sektor pariwisata berbasis Danau Toba. Sejalan dengan komitmen nasional dan global, Kabupaten Toba berupaya mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) sebagai kerangka pembangunan yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan secara seimbang dan berkelanjutan.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa pencapaian TPB di Kabupaten Toba masih menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks dan multidimensi. Di bidang sosial, meskipun terdapat kemajuan, tingkat kemiskinan masih signifikan, terutama di kawasan perdesaan. Akses dan mutu layanan pendidikan dan kesehatan belum merata, dengan disparitas yang cukup nyata antara wilayah perkotaan seperti Balige dan kawasan perdesaan seperti Ajibata. Angka putus sekolah, rendahnya kualitas sarana kesehatan, dan keterbatasan akses air bersih serta sanitasi menjadi permasalahan utama yang perlu diatasi.

Dari sisi ekonomi, Kabupaten Toba masih bergantung pada sektor primer dengan produktivitas yang relatif rendah. Kesempatan kerja yang layak dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah belum optimal, sehingga pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat berjalan lambat. Sektor pariwisata yang menjadi tumpuan utama belum sepenuhnya memberdayakan masyarakat lokal secara inklusif dan berkelanjutan, serta menghadapi risiko degradasi lingkungan dan budaya akibat pengelolaan yang kurang terpadu.

Lingkungan hidup menghadirkan tantangan besar berupa degradasi kualitas danau, deforestasi, pencemaran limbah, dan perubahan iklim yang berdampak pada keberlangsungan ekosistem dan mata pencaharian masyarakat. Pengelolaan sumber daya alam yang belum maksimal dan lemahnya pengawasan terhadap aktivitas pembangunan berisiko mengancam kelestarian lingkungan dan fungsi kawasan strategis nasional.

Kelembagaan dan tata kelola juga menjadi faktor penting dalam pencapaian TPB. Koordinasi antar instansi pemerintah, sinergi dengan sektor swasta, serta partisipasi aktif masyarakat masih perlu ditingkatkan agar perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan pembangunan berjalan efektif dan akuntabel. Keterbatasan data terpilah dan sistem informasi yang belum terintegrasi menjadi kendala dalam pengambilan kebijakan berbasis bukti.

Dalam menghadapi isu-isu tersebut, Kabupaten Toba perlu memperkuat strategi pembangunan yang berbasis pendekatan lintas sektoral dan terintegrasi. Peningkatan kualitas layanan sosial dasar, pengembangan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, pelestarian lingkungan dan budaya, serta penguatan kelembagaan dan partisipasi masyarakat harus menjadi fokus utama. Optimalisasi sumber daya lokal,

pengembangan inovasi, serta adaptasi terhadap perubahan iklim juga perlu menjadi bagian integral dalam agenda pembangunan berkelanjutan di daerah.

Dengan komitmen yang kuat dan kolaborasi antar pemangku kepentingan, Kabupaten Toba dapat mempercepat pencapaian TPB, mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang merata, menjaga kelestarian lingkungan, serta mempertahankan identitas budaya sebagai modal pembangunan jangka panjang.

Dengan melihat korelasi dan saling pengaruh antar isu menggunakan tabulasi silang antara isu utama capaian indikator TPB, isu strategis dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya, isu berdasarkan muatan KLHS (base line) serta analisis isu utama capaian indikator TPB dengan muatan KLHS, maka dapat dirumuskan isu strategis TPB di Kabupaten Toba adalah sebagai berikut:

1. Pengentasan Kemiskinan, Ketimpangan Kesejahteraan
2. Penguatan Ketahanan Pangan
3. Pengelolaan Risiko Bencana
4. Pencegahan Kerusakan Lingkungan Hidup
5. Pengembangan Infrastruktur Yang Berkualitas Secara Merata
6. Penguatan Daya Saing Pariwisata
7. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan
8. Pelayanan Kesehatan Secara Siklus Hidup
9. Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan (Perbaikan Struktur Ekonomi, Pertanian, Industri/Manufaktur, UMKM)
10. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (Pembangunan Pendidikan, Tenaga Kerja)
11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

E. Isu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba

Perumusan isu-isu strategis terkait dengan dinamika lingkungan strategis lembaga/institusi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Berdasarkan akar masalah yang diidentifikasi pada tabel 2.3 kemudian dirumuskan sebagaimana diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Isu Strategis Berdasarkan Identifikasi Akar Masalah

No	Masalah	Akar Masalah	Isu Strategis
1	Belum optimalnya koordinasi antara institusi perencana dengan OPD terkait	Kurangnya Koordinasi antara institusi perencana dan OPD	Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi institusi perencana dengan OPD terkait
2	Belum sinkronnya antara RPJMD dengan Renstra OPD	Adanya perbedaan pemahaman antara institusi perencana dengan OPD	Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi institusi perencana dengan OPD terkait
3	Pemanfaatan hasil riset dan penggunaan data dalam perencanaan pembangunan belum optimal	Hasil riset belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam proses perencanaan dan pengambilan kebijakan	Integrasi riset, data statistik, dan pengembangan teknologi dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan
		Jumlah ASN di bidang penelitian dan pengembangan yang belum memadai dan kompetensi ASN mengenai penelitian dan pengembangan masih kurang	Peningkatan kapasitas ASN di bidang penelitian dan pengembangan

No	Masalah	Akar Masalah	Isu Strategis
4	Jumlah Sumberdaya Manusia (SDM) aparatur belum memadai / belum sesuai dengan perhitungan kebutuhan ideal organisasi	Jumlah ASN belum memadai, Kompetensi ASN yang belum merata pada tiap bidang	Peningkatan kapasitas ASN perencana
5	Belum optimalnya pemanfaatan, pengelolaan dan pengintegrasian data berbasis Teknologi Informasi yang tersusun secara sistematis dan akurat	Pengelolaan data yang masih dilakukan oleh masing masing bidang	Koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi antar bidang dalam perencanaan pembangunan daerah
6	Sistem aplikasi perencanaan yang belum terintegrasi dengan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi	Sistem aplikasi pengendalian, monitoring dan evaluasi yang belum dapat dipergunakan	Integrasi riset, data statistik, dan pengembangan teknologi dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Badan perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah kabupaten Toba

Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba dengan Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029, maka dalam penyusunannya harus menjadikan dokumen perencanaan jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Berdasarkan urusan dan kewenangan yang dimiliki, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kabupaten Toba, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba berkontribusi untuk mewujudkan Misi ke-4 dalam RPJMD yaitu:

Misi ke-4: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sebagai pelayan (parhobas) rakyat

Misi ke-4 memiliki 1 tujuan yaitu:

4.1 Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Dengan sasaran sebagai berikut:

4.1.1 Meningkatnya tata kelola pemerintahan

Selanjutnya dengan mengacu pada tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD tersebut di atas, maka tujuan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba yang dirumuskan dalam Renstra Tahun 2025-2029 adalah

“Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan meningkatnya inovasi daerah”

untuk lebih jelasnya tujuan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1
Tujuan Ranhir Renstra Bappelitbangda Tahun 2025-2029

Tujuan	Indikator Tujuan	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan meningkatnya inovasi daerah	Nilai Perencanaan Kinerja	Nilai	21,03	21,80	22,40	22,90	23,50	24
	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	39,74	41	42	43	44	45

3.2 Sasaran Badan perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah kabupaten Toba

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.

Sasaran juga dapat diartikan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah

dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi perangkat daerah.

Sasaran yang dirumuskan dalam Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba dalam rangka pencapaian tujuan selama tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
2. Meningkatnya inovasi daerah
3. Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah

untuk lebih jelasnya sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2
Sasaran Ranhir Renstra Bappelitbangda Tahun 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran,	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun				
					2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan meningkatnya inovasi daerah		Nilai Perencanaan Kinerja	Nilai	21,03	21,80	22,40	22,90	23,50	24
		Indeks Inovasi Daerah	Indeks	39,74	41	42	43	44	45
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Nilai Perencanaan Kinerja	Nilai	21,03	21,80	22,40	22,90	23,50	24
	Meningkatnya inovasi daerah	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	39,74	41	42	43	44	45
	Meningkatnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi Internal AKIP	Nilai	64,25	76,10	78,50	80,50	82,20	85,00

3.3 Strategi Arah Kebijakan Perangkat Daerah

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka berpikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dirumuskan secara teknokratik dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah serta mempedomani prioritas nasional yang diselenggarakan oleh kementerian/lembaga terkait.

Strategi dan arah kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba tahun 2025-2029 secara konseptual didasarkan RPJMD Kabupaten Toba tahun 2025-2029 yang menetapkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan Kabupaten Toba.

Visi Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 merupakan visi Bupati/Wakil Bupati Terpilih Tahun 2024 yang menjadi gambaran pernyataan kondisi Kabupaten Toba yang akan dicapai pada tahun 2029. Visi Kabupaten Toba Tahun 2025-2029 adalah “TOBA MANTAP 2029: Maju Daerahnya, Sejahtera Rakyatnya dan Berkelanjutan Pembangunannya”.

Selanjutnya Misi yang telah ditetapkan dalam mencapai Visi Kabupaten Toba yaitu :

1. Membangun sumber daya manusia yang berdaya saing dan berakhlak;
2. Membangun infrastruktur yang terintegrasi, berkualitas dan merata;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan berbasis potensi daerah dan mendukung kemandirian daerah;
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sebagai pelayan (parhobas) rakyat;

5. Meningkatkan keamanan dan ketertiban;
6. Melestarikan nilai budaya dan kearifan lokal.

Perumusan strategi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba dalam melaksanakan urusan sesuai dengan misi pembangunan Kabupaten Toba dilakukan dengan analisis Kekuatan-Kelemahan-Peluang-Tantangan (SWOT). Komponen SWOT dirumuskan sebagai berikut:

1. Kekuatan (Strengths) :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba memiliki peranan strategis dalam perencanaan pembangunan daerah yang bersifat sektoral.
- b. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba memiliki perananan strategis dalam pengembangan inovasi daerah.

2. Kelemahan (Weaknesses) :

- a. Jumlah sumber daya manusia (SDM) aparatur belum memadai/ belum sesuai dengan perhitungan kebutuhan ideal organisasi.
- b. Kompetensi Aparatur dalam melaksanakan fungsi pengendalian, pemantauan dan evaluasi rencana pembangunan daerah yang masih kurang.
- c. Belum konsistennya antar dokumen perencanaan.
- d. Dukungan sarana prasarana dan fasilitas kerja dalam rangka mendukung kinerja lembaga belum memadai.
- e. Publikasi dan sosialisasi kebijakan rencana pembangunan daerah belum optimal.
- f. Pemanfaatan hasil riset dan penggunaan data dalam perencanaan pembangunan belum optimal.

3. Peluang (Opportunities) :

- a. Kesempatan dalam berkoordinasi, baik secara vertikal maupun horizontal dalam upaya sinkronisasi dan konsultasi rencana pembangunan daerah.

- b. Kemudahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

4. Tantangan (Threats) :

- a. Agenda politik nasional, regional (provinsi) dan lokal berpotensi memicu deviasi antara dokumen perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan.
- b. Data, informasi dan hasil kajian yang tersedia belum sepenuhnya digunakan dan dimanfaatkan sebagai bahan perumusan kebijakan khususnya untuk proses perencanaan.
- c. Kurang optimalnya monitoring/pengendalian dan evaluasi program/kegiatan pembangunan secara berkala di tingkat OPD untuk mengarahkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan maupun sebagai feedback bagi perencanaan pembangunan daerah periode selanjutnya.
- d. Masih lemahnya kapasitas sejumlah Organisasi Perangkat Daerah dalam fungsi perencanaan pembangunan.
- e. Masih rendahnya kapasitas anggaran pemerintah daerah dalam pembiayaan pembangunan.

Tabel 3.3
Strategi dan Arah Kebijakan Ranhir Renstra Bappelitbangda
Tahun 2025-2029

Visi	:	TOBA MANTAP 2029: Maju Daerahnya, Sejahtera Rakyatnya dan Berkelanjutan Pembangunannya		
Misi 4	:	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih sebagai pelayan (parhobas) rakyat		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan meningkatnya	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Meningkatkan kualitas perencanaan	Peningkatan peran serta Stakeholders dalam perencanaan pembangunan	
			Peningkatan keselarasan antar dokumen perencanaan pembangunan daerah	

inovasi daerah			Peningkatan sinergi dan koordinasi antar perangkat daerah
			Penerapan reward dan punishment bagi OPD yang memiliki konsistensi, inkonsistensi dengan capaian kinerja
		Meningkatkan pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan	Peningkatan kualitas pengendalian, monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan
	Meningkatnya inovasi daerah	Meningkatkan penelitian, pengembangan, inovasi dan daya saing daerah	Penguatan riset dan inovasi untuk meningkatkan efisiensi
			Optimalisasi penelitian dan pengembangan
			Peningkatan kualitas hasil kelitbangan
			Membangun produktivitas dan daya saing masyarakat
			Peningkatan fasilitasi penguatan Inovasi daerah

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
BAPPELITBANGDA KABUPATEN TOBA

4.1 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang telah disusun pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025-2029), meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba dengan tetap mengacu pada program pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Toba Tahun 2025-2029.

Secara umum indikator pencapaian kinerja yang ingin diterapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba pada periode lima tahun ke depan adalah penekanan kepada indikator keluaran (output) dan hasil (outcome) dari program dan kegiatan perencanaan dan kajian strategis pembangunan.

Program Perangkat Daerah merupakan program prioritas RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Rencana program prioritas beserta indikator keluaran program dan pagu sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD dijabarkan kedalam rencana kegiatan untuk setiap program prioritas tersebut. Oleh karena itu, masing-masing rencana program dan kegiatan kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pagu indikatif dijabarkan berdasarkan Tabel 4.1. selanjutnya Tabel 4.2 menguraikan rencana program, kegiatan dan pendanaan Perangkat Daerah dilengkapi dengan indikator kinerja dan target capaian pada setiap tahunnya.

Tabel 4.1.
Rencana Program Bappelitbangda 2025-2029

Program	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
				2026		2027		2028		2029		2030	
				Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Internal AKIP	Nilai	64,25	76,10	4.672.656.000	78,50	4.923.351.000	80,50	4.955.012.000	82,20	5.025.657.000	85,00	5.132.306.000
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persen	100	100	275.800.000	100	245.800.000	100	245.800.000	100	320.800.000	100	475.800.000
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persen	100	100		100		100		100		100	
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah	Persen	100	100	280.000.000		394.000.000	100	364.000.000	100	557.000.000	100	650.000.000
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100	100	115.000.000	100	134.000.000	100	120.000.000	100	180.000.000	100	215.000.000
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	Persen	100	100	85.000.000	100	130.000.000	100	120.000.000	100	177.000.000	100	205.000.000
	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	100	100	80.000.000	100	130.000.000	100	124.000.000	100	200.000.000	100	230.000.000
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	39,74	41	80.000.000	42	120.000.000	43	80.000.000	44	100.000.000	45	130.000.000

Tabel 4.2.
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Bappelitbangda 2025-2029

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
							2026		2027		2028		2029		2030	
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah dan				nilai perencanaan kinerja	Nilai	21,03	21,80		22,40		22,90		23,50		24,00	
				Indeks Inovasi Daerah	Indeks	39,74	41		42		43		44		45	
	1. Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah			nilai perencanaan kinerja	Nilai	21,03	21,80		22,40		22,90		23,50		24,00	
	2. Meningkatkan Inovasi Daerah			Indeks Inovasi Daerah	Indeks	39,74	41		42		43		44		45	
	3. Meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah			Nilai Evaluasi Internal AKIP	Nilai	64,25	76,10		78,50		80,50		82,20		85,00	
								5.308.456.000		5.683.151.000		5.644.812.000		6.003.457.000		6.388.106.000
	5.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Evaluasi Internal AKIP	Nilai	64,25	76,10	4.672.656.000	78,50	4.923.351.000	80,50	4.955.012.000	82,20	5.025.657.000	85,00	5.132.306.000
	5.01.01.2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan 1. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu dan sesuai ketentuan	Persen			5.000.000		5.000.000		5.000.000		5.000.000		7.000.000
	5.01.01.2.01.0001		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2	2	3.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	2	4.000.000	3	6.000.000
	5.01.01.2.01.0006		2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	0	22	1.000.000								
	5.01.01.2.01.0007		3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	0	13	1.000.000	13	1.000.000	13	1.000.000	13	1.000.000	13	1.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
							2026		2027		2028		2029		2030	
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
		5.01.01.2.02	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang disusun tepat waktu	Persen			4.235.037.000		4.281.938.000		4.329.777.000		4.378.573.000		4.428.345.000
		5.01.01.2.02.0001	1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/bulan	32	34	4.234.037.000	34	4.280.938.000	34	4.328.777.000	34	4.377.573.000	34	4.427.345.000
		5.01.01.2.02.0005	2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	0	17	1.000.000	17	1.000.000	17	1.000.000	17	1.000.000	17	1.000.000
		5.01.01.2.06	3. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen			83.000.000		180.000.000		161.000.000		180.000.000		220.000.000
		5.01.01.2.06.0001	1. Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000
		5.01.01.2.06.0002	2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	20	9	10.000.000	9	15.000.000	9	15.000.000	9	15.000.000	9	15.000.000
		5.01.01.2.06.0005	3. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000
		5.01.01.2.06.0006	4. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	0	0	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000	2	1.000.000
		5.01.01.2.06.0008	5. Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	1	4	6.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000	4	15.000.000
		5.01.01.2.06.0009	6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	100	65.000.000	100	147.000.000	100	128.000.000	100	147.000.000	100	187.000.000
		5.01.01.2.07	4. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen			2.000.000		6.000.000		6.000.000		6.000.000		18.000.000
		5.01.01.2.07.0001	1. Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10.000.000
		5.01.01.2.07.0005	2. Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	3	2.000.000	6	5.000.000	6	5.000.000	6	5.000.000	6	7.000.000
		5.01.01.2.07.0006	3. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000
		5.01.01.2.08	5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Realisasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen			173.200.000		173.250.000		173.300.000		173.350.000		173.400.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
							2026		2027		2028		2029		2030	
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
		5.01.01.2.08.0002	1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	2	2	25.000.000	2	25.050.000	2	25.100.000	2	25.150.000	2	25.200.000
		5.01.01.2.08.0004	2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	2	2	148.200.000	2	148.200.000	2	148.200.000	2	148.200.000	2	148.200.000
		5.01.01.2.09	6. Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara	Persen			174.419.000		277.163.000		279.935.000		282.734.000		285.561.000
		5.01.01.2.09.0001	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	1	1	48.319.800	1	48.319.800	1	48.319.800	1	48.319.800	1	48.319.800
		5.01.01.2.09.0002	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	15	15	111.151.900	15	201.151.900	15	201.151.900	15	201.151.900	15	201.151.900
		5.01.01.2.09.0006	3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	26	46	4.947.300	46	27.691.300	46	30.463.300	46	33.262.300	46	36.089.300
		5.01.01.2.09.0009	4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	1	10.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
		5.01.02	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persen	100	100	275.800.000	100	245.800.000	100	245.800.000	100	320.800.000	100	475.800.000
				Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persen	100	100		100		100		100		100	
		5.01.02.2.01	1. Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan					270.000.000		210.000.000		220.000.000		290.000.000		438.000.000
		5.01.02.2.01.0001	1. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dokumen	2	0	0	1	8.000.000	1	8.000.000	2	10.000.000	1	25.000.000
		5.01.02.2.01.0002	2. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah	Dokumen	0	0	0	2	10.000.000	2	10.000.000	5	10.000.000	6	15.000.000
		5.01.02.2.01.0003	3. Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	0	1	35.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	70.000.000	2	113.000.000
		5.01.02.2.01.0005	4. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	Berita Acara	1	1	120.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	120.000.000	2	150.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
							2026		2027		2028		2029		2030	
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
		5.01.02.2.01.0006	5. Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	Usulan	1.200	500	10.000.000	500	8.000.000	500	8.000.000	500	10.000.000	500	15.000.000
		5.01.02.2.01.0007	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	2	3	105.000.000	1	44.000.000	1	54.000.000	1	70.000.000	2	120.000.000
		5.01.02.2.03	Pengendalian, Evaluasi dan 2. Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					5.800.000		35.800.000		25.800.000		30.800.000		37.800.000
		5.01.02.2.03.0001	1. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	0	0	0	7	30.000.000	8	20.000.000	11	25.000.000	11	30.000.000
		5.01.02.2.03.0003	2. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Laporan	5	4	5.800.000	4	5.800.000	4	5.800.000	4	5.800.000	4	7.800.000
		5.01.03	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah	Persen	100	100	280.000.000	100	394.000.000	100	364.000.000	100	557.000.000	100	650.000.000
				Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100	100	115.000.000	100	134.000.000	100	120.000.000	100	180.000.000	100	215.000.000
				Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA		100	100	85.000.000	100	130.000.000	100	120.000.000	100	177.000.000	100	205.000.000
				Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		100	100	80.000.000	100	130.000.000	100	124.000.000	100	200.000.000	100	230.000.000
		5.01.03.2.01	Koordinasi Perencanaan Bidang 1. Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					115.000.000		134.000.000		120.000.000		180.000.000		215.000.000
		5.01.03.2.01.0001	1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	0	14	30.000.000	14	35.000.000	14	30.000.000	14	38.000.000	14	33.000.000
		5.01.03.2.01.0005	3. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	4	1	75.000.000	1	80.000.000	1	75.000.000	1	120.000.000	2	155.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
							2026		2027		2028		2029		2030	
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
		5.01.03.2.01.0007	4. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	4	28	10.000.000	28	19.000.000	28	15.000.000	28	22.000.000	28	27.000.000
		5.01.03.2.02	2. Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)					85.000.000		130.000.000		120.000.000		177.000.000		205.000.000
		5.01.03.2.02.0001	1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	5	1	70.000.000	1	100.000.000	1	95.000.000	1	142.000.000	2	158.000.000
		5.01.03.2.02.0003	2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Laporan	0	29	15.000.000	29	30.000.000	30	25.000.000	38	35.000.000	42	47.000.000
		5.01.03.2.03	3. Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan					80.000.000		130.000.000		124.000.000		200.000.000		230.000.000
		5.01.03.2.03.0001	1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	3	1	50.000.000	1	100.000.000	1	95.000.000	1	150.000.000	2	190.000.000
		5.01.03.2.03.0003	2. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	4	50	30.000.000	50	30.000.000	50	29.000.000	50	50.000.000	50	40.000.000
		5.05.02	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	39,74	41	80.000.000	42	120.000.000	43	80.000.000	44	100.000.000	45	130.000.000
		5.05.02.2.01	1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Persentase kajian berbasis bukti dalam pengembangan potensi unggulan yang dimanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah	Persen			40.000.000		60.000.000		40.000.000		40.000.000		40.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Outcome), Kegiatan (Output)	Satuan	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun									
							2026		2027		2028		2029		2030	
							Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu
		5.05.02.2.01.0001	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan 1. Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah	Laporan	6	1	40.000.000	1	60.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000	1	40.000.000
		5.05.02.2.04	2. Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Persentase Produk Inovasi yang dimanfaatkan	Persen			40.000.000		60.000.000		40.000.000		60.000.000		90.000.000
		5.05.02.2.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif 1.	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	2	1	40.000.000	1	60.000.000	1	40.000.000	1	60.000.000	1	90.000.000

4.1 Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Sub-kegiatan prioritas dalam Rencana Strategis (Renstra) merupakan bagian yang lebih terperinci dari program prioritas yang disusun dalam Renstra, dengan tujuan mendukung pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Penetapan sub-kegiatan ini difokuskan untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian tujuan strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba.

Adapun daftar sub-kegiatan prioritas Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.3.
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program
Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	No	Kegiatan/Sub Kegiatan
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Meningkatnya kualitas penyusunan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah	1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
				Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
			2	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
				Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Meningkatnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	1	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
				Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia

No	Program Prioritas	Outcome	No	Kegiatan/Sub Kegiatan
			2	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)
				Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian
			3	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
				Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
				Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
3	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Meningkatnya inovasi daerah	1	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi
				Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif
4	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah	1	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
				Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
				Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

4.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan tolok ukur yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis suatu organisasi, unit kerja, maupun individu. IKU berperan sebagai acuan serta instrumen pengendalian kinerja, dan menjadi dasar dalam penyusunan rencana kerja, penganggaran, dokumen kinerja, serta laporan akuntabilitas yang digunakan untuk mengevaluasi pencapaian kinerja secara menyeluruh. IKU pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.4.
Indikator Kinerja Utama Ranhir Bappelitbangda

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
1	Nilai Perencanaan Kinerja	Nilai	21,03	21,80	22,40	22,90	23,50	24,00
2	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	41	41	42	43	44	45
3	Nilai Evaluasi Internal AKIP	Nilai	64,25	76,10	78,50	80,50	82,20	85,00

4.3 Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Indikator Kinerja Daerah menggambarkan tingkat penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai asas otonomi daerah. IKD pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5.
Indikator Kinerja Daerah Ranhir Bappelitbangda

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
1	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	41	41	42	43	44	45

4.4 Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. IKK pada Badan Perencanaan Pembangunan,

Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.6.
Indikator Kinerja Kunci Ranhir Bappelitbangda

No	Indikator	Satuan	Baseline 2024	Target Tahun				
				2026	2027	2028	2029	2030
1	Nilai Evaluasi Internal AKIP	Nilai	64,25	76,10	78,50	80,50	82,20	85,00
2	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persen	100	100	100	100	100	100
3	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	Persen	100	100	100	100	100	100
4	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	Persen	100	100	100	100	100	100
5	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja Perangkat Daerah	Persen	100	100	100	100	100	100
6	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Persen	100	100	100	100	100	100
7	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persen	100	100	100	100	100	100
8	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	41	41	42	43	44	45

BAB V

PENUTUP

Rancangan Akhir Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025–2029 merupakan panduan kerja bagi Perangkat Daerah selama lima (5) tahun ke depan. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) digunakan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025–2029 dilaksanakan dalam rangka mendukung visi dan misi Kepala Daerah dari aspek perencanaan selama lima (5) tahun mendatang. Perencanaan pembangunan yang berkualitas akan berkontribusi dalam mewujudkan pembangunan yang sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba akan ditetapkan setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Toba disahkan. Renstra Tahun 2025–2029 merupakan bagian dari penjabaran visi dan misi Kepala Daerah terpilih untuk periode 2025–2029. Dokumen Renstra ini berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba.

Adapun beberapa kaidah yang perlu ditetapkan dalam pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba berkewajiban mendukung pencapaian target serta melaksanakan program-program yang tercantum dalam Renstra Tahun 2025–2029 dengan sebaik-baiknya;
2. Renstra akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba, yang merupakan dokumen perencanaan tahunan untuk periode tahun 2025 hingga 2029. Dalam rangka menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program, serta kegiatan, penyusunan Renja wajib berpedoman pada Renstra;

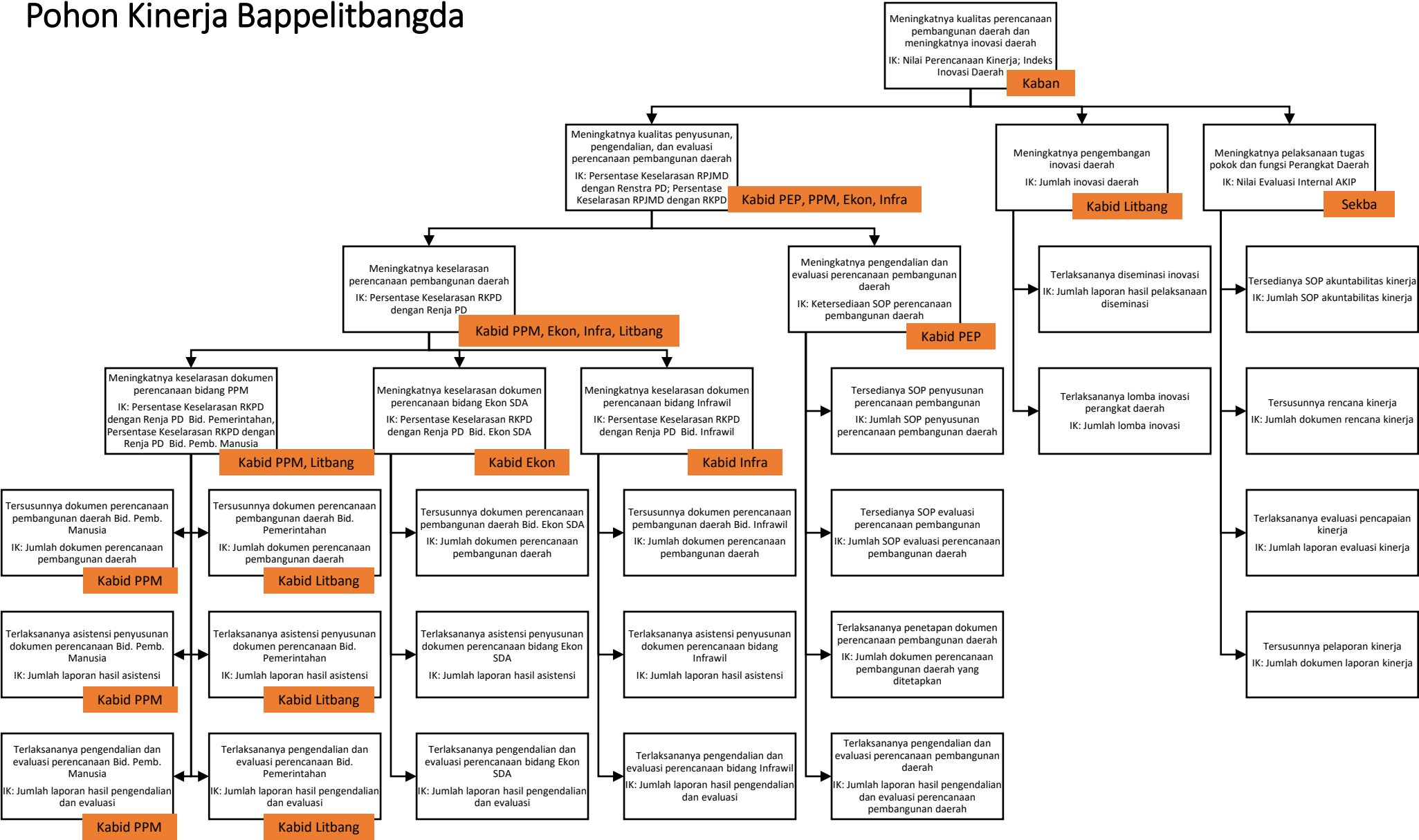
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra, perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan, pelaksanaan, dan hasil program serta kegiatan Renstra;
4. Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba Tahun 2025–2029 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan kinerja tahunan maupun lima tahunan, sehingga dapat meminimalkan pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari visi dan misi Kepala Daerah periode 2025–2029 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba;
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di tingkat nasional dan/atau daerah, maka perubahan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, seluruh aparatur Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba berkewajiban untuk berpartisipasi aktif serta menunjukkan komitmen penuh dalam pencapaian dan keberhasilan pelaksanaan Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Toba.

Balige, Agustus 2025
KEPALA BADAN
PERENCANAAN,
PEMBANGUNAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN TOBA

SOFIAN H.H SITORUS, ST
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19730317 200604 1 002

Pohon Kinerja Bappelitbangda



Metadata Indikator Renstra

A. Indikator Tujuan Renstra

1. Nilai Perencanaan Kinerja

Nama Indikator	Nilai Perencanaan Kinerja
Satuan	Nilai
Penggunaan Indikator	Tujuan Bappelitbangda
Definisi	
Rumus Perhitungan	Hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Interpretasi	
Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Frekuensi	Tahunan

2. Indeks Inovasi Daerah

Nama Indikator	Indeks Inovasi Daerah
Satuan	Indeks
Penggunaan Indikator	Tujuan Bappelitbangda
Definisi	Indeks Inovasi Daerah adalah ukuran untuk menilai tingkat inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, biasanya dihitung dan dianalisis oleh Kementerian Dalam Negeri RI melalui sistem Indeks Inovasi daerah.
Rumus Perhitungan	$IID = \frac{\sum (N_i \times B_i)}{\sum B_i}$ Keterangan: ➤ N_i = nilai inovasi ke-i (diberikan berdasarkan kriteria tertentu) ➤ B_i = bobot untuk inovasi ke-i (menurut aspek atau kategori penilaian) ➤ $\sum$ = penjumlahan semua nilai dan bobot dari seluruh inovasi yang dinilai

Interpretasi	skor dan kategori indeks inovasi daerah : <table border="1"> <tr> <th>Kategori</th><th>Rentang Skor</th></tr> <tr> <td>Sangat Inovatif</td><td>>60</td></tr> <tr> <td>Inovatif</td><td>41-60</td></tr> <tr> <td>Kurang Inovatif</td><td><40</td></tr> </table>	Kategori	Rentang Skor	Sangat Inovatif	>60	Inovatif	41-60	Kurang Inovatif	<40
Kategori	Rentang Skor								
Sangat Inovatif	>60								
Inovatif	41-60								
Kurang Inovatif	<40								
Sumber Data	hasil penilaian Kemendagri melalui SIID								
Frekuensi	Tahunan								

B. Indikator Sasaran Renstra

1. Nilai Perencanaan Kinerja

Nama Indikator	Nilai Perencanaan Kinerja
Satuan	Nilai
Penggunaan Indikator	Sasaran Bappelitbangda
Definisi	
Rumus Perhitungan	Hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Interpretasi	
Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Frekuensi	Tahunan

2. Indeks Inovasi Daerah

Nama Indikator	Indeks Inovasi Daerah
Satuan	Indeks
Penggunaan Indikator	Sasaran Bappelitbangda
Definisi	Indeks Inovasi Daerah adalah ukuran untuk menilai tingkat inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, biasanya dihitung dan dianalisis oleh Kementerian Dalam Negeri RI melalui sistem Indeks Inovasi daerah.

Rumus Perhitungan	$IID = \frac{\sum(N_i \times B_i)}{\sum B_i}$ Keterangan: ➤ N_i = nilai inovasi ke-i (diberikan berdasarkan kriteria tertentu) ➤ B_i = bobot untuk inovasi ke-i (menurut aspek atau kategori penilaian) ➤ $\sum$ = penjumlahan semua nilai dan bobot dari seluruh inovasi yang dinilai								
Interpretasi	skor dan kategori indeks inovasi daerah : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Kategori</th><th>Rentang Skor</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Sangat Inovatif</td><td>>60</td></tr> <tr> <td>Inovatif</td><td>41-60</td></tr> <tr> <td>Kurang Inovatif</td><td><40</td></tr> </tbody> </table>	Kategori	Rentang Skor	Sangat Inovatif	>60	Inovatif	41-60	Kurang Inovatif	<40
Kategori	Rentang Skor								
Sangat Inovatif	>60								
Inovatif	41-60								
Kurang Inovatif	<40								
Sumber Data	hasil penilaian Kemendagri melalui SIID								
Frekuensi	Tahunan								

C. Indikator Program

Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah

1. Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD

Nama Indikator	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD
Satuan	Persentase
Penggunaan Indikator	5.01.02 Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Kinerja Program: Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah bidang perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
Definisi	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD menggambarkan Persentase Program Renstra PD yang Diverifikasi oleh Bappeda Sebelum Penetapan, mengukur tingkat verifikasi program Renstra PD oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) sebelum

	ditetapkan, memastikan keselarasan dengan RPJMD.
Rumus Perhitungan	Persentase Program dalam RKPD terhadap RPJMD = $\left(\frac{\text{Jumlah Program dalam RKPD}}{\text{Jumlah Program dalam RPJMD}} \right) \times 100$ Keterangan: ➤ Jumlah Program dalam RKPD = Jumlah program yang tercantum dalam, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada tahun tertentu. ➤ Jumlah Program dalam RPJMD = Jumlah program yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku.
Interpretasi	Semakin besar nilai indikator menunjukkan semakin selaras antara RPJMD dengan RKPD
Sumber Data	Bappelitbangda
Frekuensi	Triwulanan

2. Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah

Nama Indikator	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah
Satuan	Persentase
Penggunaan Indikator	5.01.02 Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Kinerja Program: Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah bidang perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah
Definisi	Indikator ini mengukur sejauh mana program-program yang tercantum dalam RPJMD dapat diakomodasi dan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Rumus Perhitungan	Persentase kesesuaian Program, Target, indikator, dan Nomenklatur = $\left(\frac{\text{Jumlah Program, Target, indikator, dan Nomenklatur Program dalam Renstra}}{\text{Jumlah Program, Target, indikator, dan Nomenklatur Program dalam RPJMD}} \right) \times 100$ Keterangan: ➤ Jumlah Program,Target,indikator, dan Nomenklatur Program dalam Renstra = Jumlah Program,Target,indikator, dan Nomenklatur yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra). ➤ Jumlah Program,Target, indikator,dan Nomenklatur Program dalam RPJMD = Jumlah Program,Target, indikator, dan Nomenklatur yang tercantum dalam Rencana Penguann Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Interpretasi	Semakin besar nilai indikator menunjukkan semakin

	selaras antara RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah
Sumber Data	Bappelitbangda
Frekuensi	Triwulanan

Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Nama Indikator	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Satuan	Persentase
Penggunaan Indikator	5.01.02 Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kinerja Program: Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Definisi	Indikator ini Mengukur tingkat keselarasan antara program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Program dalam Renja PD terhadap RKPD} = \left(\frac{\text{Jumlah Program dalam Renja PD}}{\text{Jumlah Program Dalam RKPD}} \right) \times 100$ Keterangan: ➤ Jumlah Program dalam Renja PD = Jumlah program yang tercantum dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) pada tahun tertentu. ➤ Jumlah Program dalam RKPD = Jumlah program yang tercantum dalam Rencana kerja Pem,erintah Daerah (RKPD) pada tahun yang sama.
Interpretasi	Semakin besar nilai indikator menunjukkan semakin selaras antara RKPD dengan Renja Perangkat Daerah bidang koordinasi Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Sumber Data	Bappelitbangda
Frekuensi	Triwulanan

2. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA

Nama Indikator	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA
Satuan	Persentase
Penggunaan Indikator	5.01.02 Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kinerja Program: Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Perekonomian dan SDA
Definisi	Indikator ini mengukur tingkat keselarasan antara program dan kegiatan dalam RKPD dengan program dan kegiatan dalam Renja PD pada bidang Perekonomian dan SDA
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Program dalam Renja PD terhadap RKPD (Bidang SDA)} = \left(\frac{\text{Jumlah Program dalam Renja PD (Bidang SDA)}}{\text{Jumlah Program Dalam RKPD (Bidang SDA)}} \right) \times 100$ Keterangan: ➤ Jumlah Program dalam Renja PD = Jumlah program yang tercantum dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) pada tahun tertentu. ➤ Jumlah Program dalam RKPD = Jumlah program yang tercantum dalam Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada tahun yang sama.
Interpretasi	Semakin besar nilai indikator menunjukkan semakin selaras antara RKPD dengan Renja Perangkat Daerah bidang koordinasi Bidang Perekonomian dan SDA
Sumber Data	Bappelitbangda
Frekuensi	Triwulanan

3. Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Nama Indikator	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Satuan	Persentase
Penggunaan Indikator	5.01.02 Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Kinerja Program: Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Definisi	Indikator ini mengukur tingkat keselarasan antara program dan kegiatan dalam RKPD dengan program dan kegiatan dalam Renja PD pada bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Rumus Perhitungan	Persentase Program dalam Renja PD terhadap RKPD (Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan) = $\left(\frac{\text{Jumlah Program dalam Renja PD}}{\text{Jumlah Program Dalam RKPD}} \right) \times 100$ Keterangan: ➤ Jumlah Program dalam Renja PD = Jumlah program yang tercantum dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) pada tahun tertentu. ➤ Jumlah Program dalam RKPD = Jumlah program yang tercantum dalam Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) pada tahun yang sama.
Interpretasi	Semakin besar nilai indikator menunjukkan semakin selaras antara RKPD dengan Renja Perangkat Daerah bidang koordinasi Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Sumber Data	Bappelitbangda
Frekuensi	Triwulanan

Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah

1. Indeks Inovasi Daerah (indeks)

Nama Indikator	Indeks Inovasi Daerah (indeks)
Penggunaan Indikator	5.05.02 Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kinerja Program: Meningkatnya Fasilitasi dan Supervisi terkait penelitian, pengembangan dan inovasi daerah
Definisi	Indeks Inovasi Daerah adalah ukuran untuk menilai tingkat inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, biasanya dihitung dan dianalisis oleh Kementerian Dalam Negeri RI melalui sistem Indeks Inovasi daerah.
Rumus Perhitungan	$IID = \frac{\sum (N_i \times B_i)}{\sum B_i}$ Keterangan: ➤ N_i = nilai inovasi ke-i (diberikan berdasarkan kriteria tertentu) ➤ B_i = bobot untuk inovasi ke-i (menurut aspek atau kategori penilaian) ➤ $\sum$ = penjumlahan semua nilai dan bobot dari seluruh inovasi yang dinilai

Interpretasi	skor dan kategori indeks inovasi daerah :	
	Kategori	Rentang Skor
	Sangat Inovatif	>60
	Inovatif	41-60
	Kurang Inovatif	<40
Sumber Data	hasil penilaian Kemendagri melalui SIID	
Frekuensi	Tahunan	

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Nilai Evaluasi Internal AKIP (angka)

Nama Indikator	Nilai Evaluasi Internal AKIP (angka)		
Penggunaan Indikator	5.01.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota; Kinerja Program: Meningkatnya akuntabilitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah		
Definisi	Evaluasi Internal AKIP merupakan hasil penilaian akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah yang dilakukan oleh APIP kabupaten		
Rumus Perhitungan	Hasil evaluasi internal akuntabilitas kinerja oleh APIP		
Interpretasi	Nilai AKIP dibagi dalam 7 kategori sesuai ketentuan yang diatur oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yaitu:		
	Nilai	Predikat	Interpretasi
	Nilai > 90 - 100	AA	Sangat Memuaskan
	Nilai > 80 – 90	A	Memuaskan
	Nilai > 70 – 80	BB	Sangat Baik
	Nilai > 60 – 70	B	Baik
	Nilai > 50 – 60	CC	Cukup (Memadai)
	Nilai > 40 – 50	C	Kurang
	Nilai > 30 – 40	D	Sangat Kurang
Sumber Data	Inspektorat Daerah		
Frekuensi	Tahunan		

